

Compang-Camping Kondisi BUMD LKM

KARAWANG- Carut-marut PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang terus menjadi sorotan publik. Kucuran dana segar dari Pemkab Karawang sebanyak Rp 2,65 M yang lagi-lagi digelontorkan pada BUMD di ambang pailit itu disinyalir tidak tepat sararan lantaran diduga selama ini menjadi ajang bancakan bagi sejumlah oknum yang sudah memiliki SK seperti PNS ataupun Anggota Dewan. Mereka dicuriugai menjadi pelaku debitur macet yang jumlahnya—kredit macet--pernah disebut anggota DPRD sampai angka Rp.5,2 M.

PT. LKM Karawang juga sudah dianggap tidak lagi kredibel untuk menjalankan usahanya, mulai dari kabar sulitnya nasabah mengambil uang simpanan, kekosongan manajemen yang berlarut - larut dan bahkan sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tak juga kunjung digelar.

Sejumlah pengaman menilai, jika memang PT LKM tidak terkendala Non Performing Load (NPL), tidak mungkin nilai piutangnya mencapai Rp.5,2 Miliar. sampai berada di ambang kepailitan. Hli Hukum UVP Karawang, Muhammad Gary Gagarin, menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai owner harus segera melakukan audit independen terhadap PT. LKM Karawang.

Menurut Gary, pengkajian dilakukan untuk mengetahui kenapa perusahaan milik daerah ini bisa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah . "Berarti ada yang salah dalam proses pengelolaannya, hal ini bisa dilihat dari analisis resiko yang rendah, tidak ada pemeriksaan